

STRATEGI PENINGKATAN NILAI RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) DI KABUPATEN MESUJI

Lola Afryana Sya'yan

Perencana Ahli Muda – Bappeda Provinsi
Lampung

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received: July 21, 2024 Revised: July 24, 2024 Accepted: July 25, 2024</p> <hr/> <p>Keywords:</p> <p>Mesuji Pembangunan, Pendidikan, Sekolah,</p>	<p>Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya menjadi konsep dan praktik utama pembangunan. Kualitas pembangunan manusia dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan negara-negara maju. Permasalahan pendidikan terjadi secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung yang memiliki nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terendah di Provinsi Lampung. Tulisan ini dibuat untuk merumuskan penyebab rendahnya RLS Kabupaten Mesuji dan merekomendasikan kebijakan untuk meningkatkan nilai RLS di Kabupaten Mesuji. Kesimpulan dari tulisan ini adalah terdapat budaya enggan bersekolah pada keluarga dengan mata pencaharian utama perkebunan. Rekomendasi dari tulisan ini adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat memanfaatkan dana desa untuk membiayai aparatur desa yang belum memiliki ijazah SMP dan SMA. Rekomendasi lainnya adalah mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai program pendidikan kesetaraan (paket).</p>
<p>To cite this article: Afriyana, sya'yan lola. (2024). Strategi Peningkatan Nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mesuji. <i>Forecasting : Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan</i>, 1(1), 01-10</p>	

PENDAHULUAN

Sebelum memasuki tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pada perkembangan selanjutnya, praktik pembangunan yang dilaksanakan oleh semua negara berkembang menjadi suatu proses multidimensi, tidak hanya dimensi ekonomi semata.

Pada tahun 1991, Bank Dunia menerbitkan suatu laporan yang menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan secara global adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai negara, khususnya negara-negara maju ternyata menyisakan permasalahan ketimpangan yang semakin tinggi. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk tidak secara otomatis berkolerasi positif dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini menjadi perhatian dan kekhawatiran banyak pihak.

Menyikapi kondisi tersebut, United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Dunia tentang Program Pembangunan mengeluarkan indeks yang dapat mengukur sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah memiliki dampak terhadap kualitas sumber daya manusia. Indeks tersebut dikenal sebagai Human Development Indeks atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang bersifat komposit yang terdiri dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan taraf hidup. Tujuan dari pengukuran ketiga dimensi tersebut terwujudnya manusia yang memiliki umur panjang dan sehat (dimensi kesehatan), pengetahuan yang luas (dimensi pendidikan) dan memiliki standar hidup yang layak (dimensi taraf hidup). Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Salah satu standar untuk mengukur kualitas kehidupan manusia adalah dari tingkat pendidikan. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terdidik merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan negara-negara maju. Pendidikan menjadi sebuah tolok ukur suatu daerah dalam menciptakan SDM yang unggul dan mampu bersaing secara global. Karena itu, hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional mereka. Sejumlah sumber menyebutkan negara Finlandia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia sejak tahun 2000. Finlandia menjadi salah satu negara dimana anak usia sekolah memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan Finlandia memiliki kehidupan yang seimbang antara sekolah dan kegiatan sehari-hari. Siswa tidak terlalu dibebani dengan berbagai tugas dan pekerjaan sekolah yang banyak. Ketika jam sekolah sudah selesai, maka siswa dapat melakukan berbagai hal dalam kegiatan sehari-hari. Siswa juga dibebaskan mengikuti beragam ekskul. Hal lain yang menjadikan tingginya kualitas pendidikan di Finlandia adalah kualitas guru sebagai tenaga pengajar. Guru-guru yang ada memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai setara dengan Strata-2 (Master) dan diberikan kompensasi pendapatan yang sangat tinggi oleh negara. Dengan demikian profesi guru menjadi profesi yang terhormat dan cukup bergengsi.

Indonesia sudah memiliki regulasi dibidang pendidikan sejak lama. Namun tonggak utama perbaikan sistem pendidikan mulai ada sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat.

Pembangunan pendidikan harus menjamin hak layanan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing dalam upaya menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Dengan merencanakan pembangunan pendidikan yang baik berarti telah merencanakan masa depan manusia yang baik dan antisipatif terhadap segala bentuk perubahan. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu dan menjamin tersedianya dana pendidikan untuk se tiap warganegara yang berusia 7-15 tahun tanpa diskriminasi.

Ada beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Salah satu indikator yang digunakan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS juga merupakan salah satu komposit dalam menghitung IPM. RLS didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Pendidikan dan sosial-budaya sangat berkaitan erat dimana sistem sosial-budaya menjadi bagian dari sistem pendidikan itu sendiri. Permasalahan pendidikan dan manusia yang ada tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, untuk menjawab tantangan dunia pendidikan sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, serta melibatkan banyak pihak.

Permasalahan pendidikan terjadi secara merata di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Pada tanggal 26 November 2008 terbit Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Mesuji. Mesuji memiliki luas wilayah sebesar 2.184 km², dengan 7 (tujuh) kecamatan dan 105 desa. Ibukota Kabupaten Mesuji terletak di Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji.

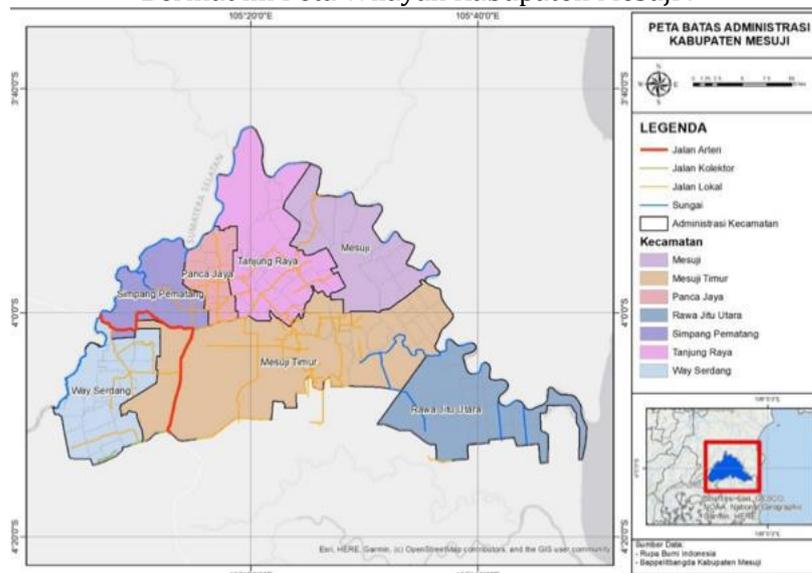
Table 1. Luas Kecamatan di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	Luas	%
1	Way Serdang	304,43	13,83
2	Simpang Pematang	166,38	7,56
3	Panca Jaya	96,27	4,37
4	Tanjung Raya	357,00	16,22
5	Mesuji	267,38	12,17
6	Mesuji Timur	735,29	33,41
7	Rawajitu Utara	273,76	12,44
Total		2.184,00	100,00

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Secara geografis Kabupaten Mesuji berada pada 3045' – 4040' Lintang Selatan dan 1060 – 1070 Bujur Timur, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan di seluruh sisi kecuali sebelah Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berikut ini Peta Wilayah Kabupaten Mesuji :



Sumber : RKPd Kabupaten Mesuji Tahun 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji sebanyak 237.935 jiwa dengan komposisi 51,43 persen berjenis kelamin laki-laki dan 48,57 persen berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Mesuji sebesar 108/km² dan menjadi salah satu kabupaten dengan kepadatan rendah di Provinsi Lampung. laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2023 sebesar 1,60. Adapun sebaran distribusi penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas	%
1	Way Serdang	46,286	19,45
2	Simpang Pematang	30,679	12,89
3	Panca Jaya	19,466	8,18
4	Tanjung Raya	46,069	19,36
5	Mesuji	24,339	10,23
6	Mesuji Timur	42,905	18,03
7	Rawajitu Utara	28,191	11,85
Total		237,935	100,00

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

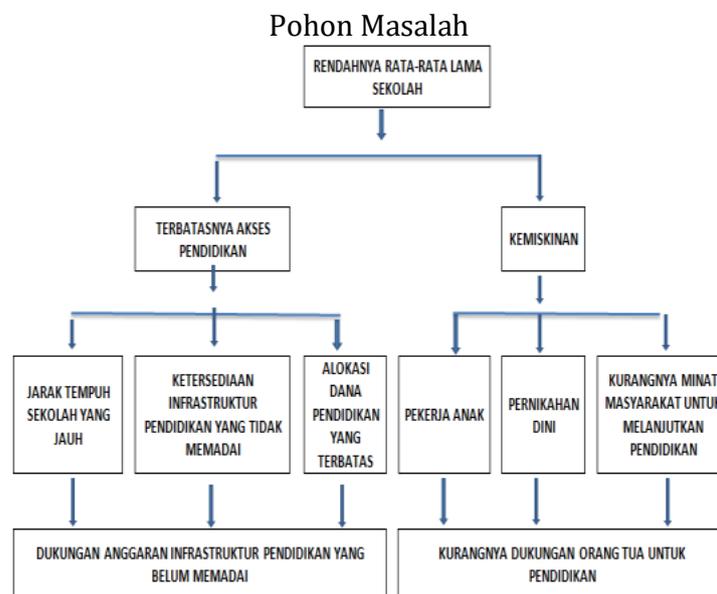
Dari tabel di atas, dapat diketahui Way Serdang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 19,45% dari total penduduk Mesuji, sebaliknya untuk Kecamatan Panca Jaya hanya memiliki 8,18% dari total penduduk Mesuji.

Salah satu permasalahan pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Mesuji adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan publikasi Kabupaten Mesuji Dalam Angka Tahun 2024, IPM Kabupaten Mesuji sebesar 66,24 pada tahun 2021, 67,12 tahun 2022 dan 67,79 tahun 2023. Nilai IPM ini yang terendah di Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) paling rendah se-Provinsi Lampung. Nilai RLS Kabupaten Mesuji sebesar 7,08 (2021), 7,09 (2022) dan 7,11 (2023). Begitupun pada nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mesuji merupakan nilai HLS paling rendah se-Provinsi Lampung yaitu sebesar 11,64 (2021), 11,80 (2022) dan 11,81 (2023). Sehingga, dua komposit pendidikan pada nilai IPM di Kabupaten Mesuji memiliki nilai terendah.

Disisi lain, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2023 menyebutkan bahwa target RLS Kabupaten Mesuji Tahun 2023 adalah sebesar 7,20 tahun. Dengan demikian, target RLS tersebut tidak tercapai. Sehingga rumusan masalah pada tulisan ini adalah :

1. Penyebab rendahnya nilai RLS di Kabupaten Mesuji
2. Strategi meningkatkan nilai RLS di Kabupaten Mesuji.



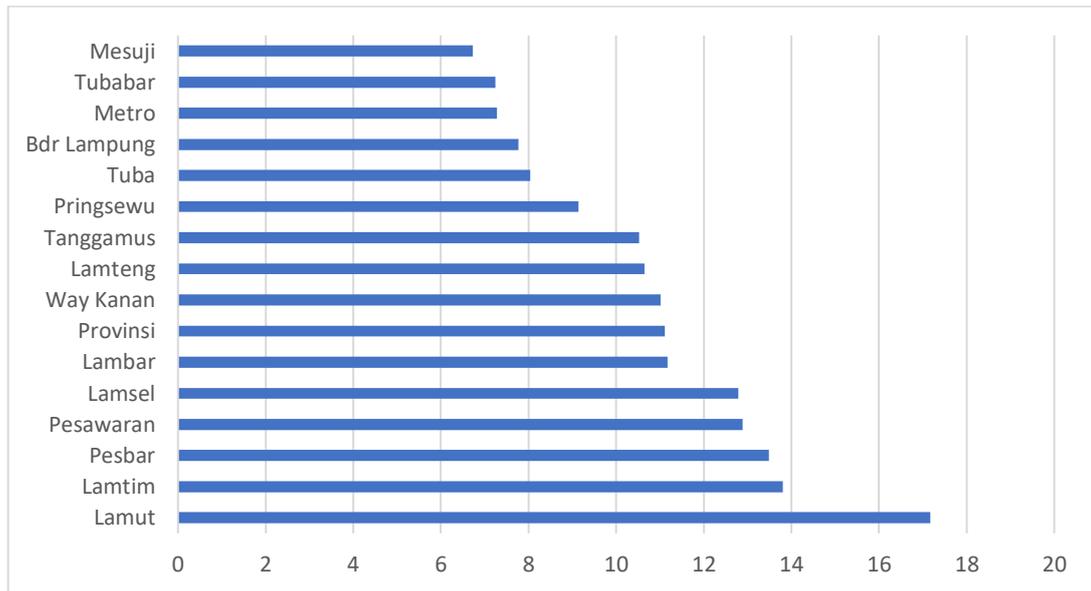
Dari pohon masalah tersebut diketahui bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh terbatasnya akses pendidikan dan kemiskinan. Terbatasnya akses pendidikan diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu : jarak tempuh sekolah yang jauh, ketersediaan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai dan alokasi dana pendidikan yang terbatas. Sedangkan kemiskinan disebabkan oleh fenomena pekerja anak, pernikahan dini dan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Sehingga terdapat dua akar masalah yaitu dukungan anggaran infrastruktur pendidikan yang belum memadai dan kurangnya dukungan orang tua untuk pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metodologi yang adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai fakta dan situasi dari berbagai data yang terkumpul mengenai masalah yang terjadi di lapangan.

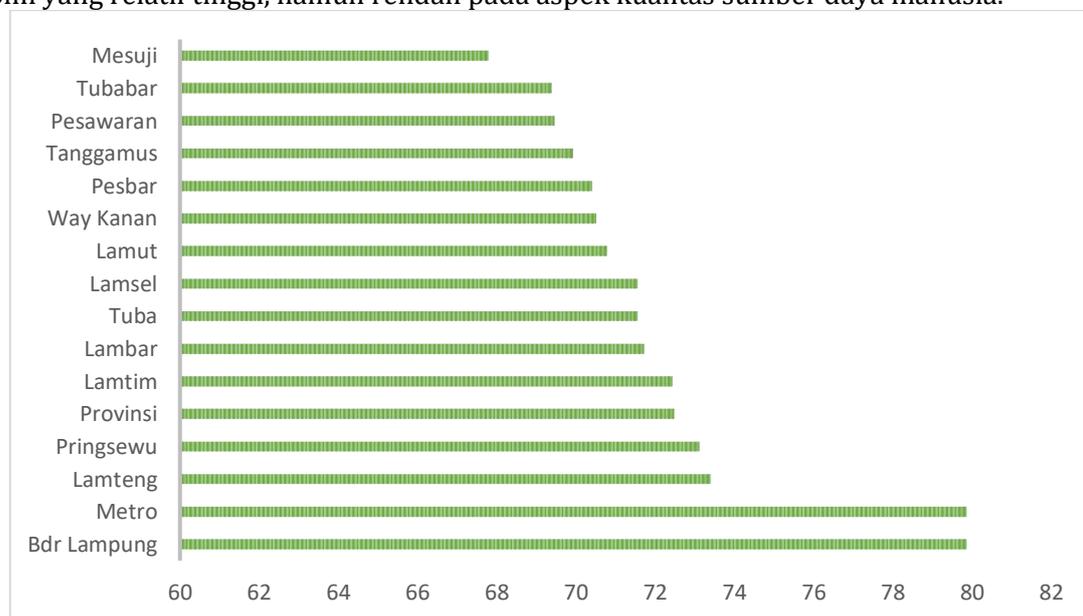
RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan publikasi Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2024, Kabupaten Mesuji memiliki tingkat kemiskinan sebesar 7,54 persen (2021), 6,84 persen (2022) dan 6,73 persen (2023). Tingkat kemiskinan tersebut menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Lampung. Capaian ini menunjukkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mesuji relatif lebih tinggi.



Gambar 1. Grafik Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023
 Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024, diolah

Berbanding terbalik dengan data tingkat kemiskinan, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan Kabupaten Mesuji merupakan kabupaten dengan nilai IPM paling rendah di Provinsi Lampung. Jadi secara kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mesuji memiliki taraf ekonomi yang relatif tinggi, namun rendah pada aspek kualitas sumber daya manusia.



Gambar 2. Grafik IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024, diolah

Dengan nilai sebesar 67,79, IPM Kabupaten Mesuji masih masuk dalam kategori “Sedang”. Kabupaten Mesuji sama dengan 3 kabupaten lainnya di Provinsi Lampung yaitu : Tulang Bawang Barat, Pesawaran dan Tanggamus. Kategori “Sedang” ini menunjukkan pembangunan kualitas sumber daya manusia belum optimal dan masih memerlukan upaya keras untuk mencapai kategori “Tinggi”. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan ukuran kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Berbagai capaian pembangunan yang dapat diukur seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran termasuk juga capaian yang dilihat seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, gedung perkantoran dan lain-lain akan kehilangan makna ketika tidak diimbangi dengan peningkatan pada kualitas sumber daya manusia.

Bila disandingkan data antara IPM dan Kemiskinan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3. Perbandingan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Mesuji Tahun 2021 – 2023

IPM			Kemiskinan		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
66,24	67,12	67,79	7,54	6,84	6,73

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan nilai IPM setiap tahunnya berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa dari tiga komposit IPM, komposit taraf hidup masyarakat di Kabupaten Mesuji sudah cukup baik yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang cukup rendah.

Table 4. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Kabupaten Mesuji Tahun 2021 – 2023

Kemiskinan			Pengangguran		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
7,54	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Jika dilakukan perbandingan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Mesuji menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat pengangguran. Hal ini dapat difahami karena semakin rendah tingkat pengangguran, maka semakin banyak angkatan kerja yang bekerja dan berprestasi. Sehingga pada akhirnya akan membuat semakin rendahnya tingkat kemiskinan.

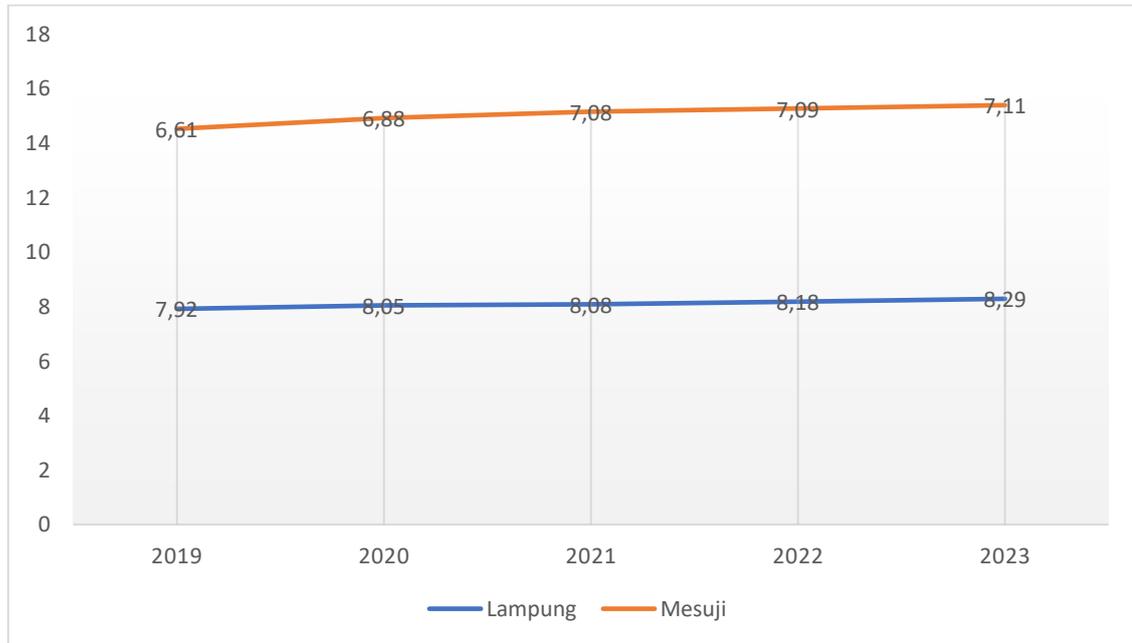
Bila disandingkan data antara IPM dan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 5. Perbandingan IPM dan UHH Kabupaten Mesuji Tahun 2021 – 2023

IPM			UHH		
2021	2022	2023	2021	2022	2023
66,24	66,24	66,24	66,24	66,24	66,24

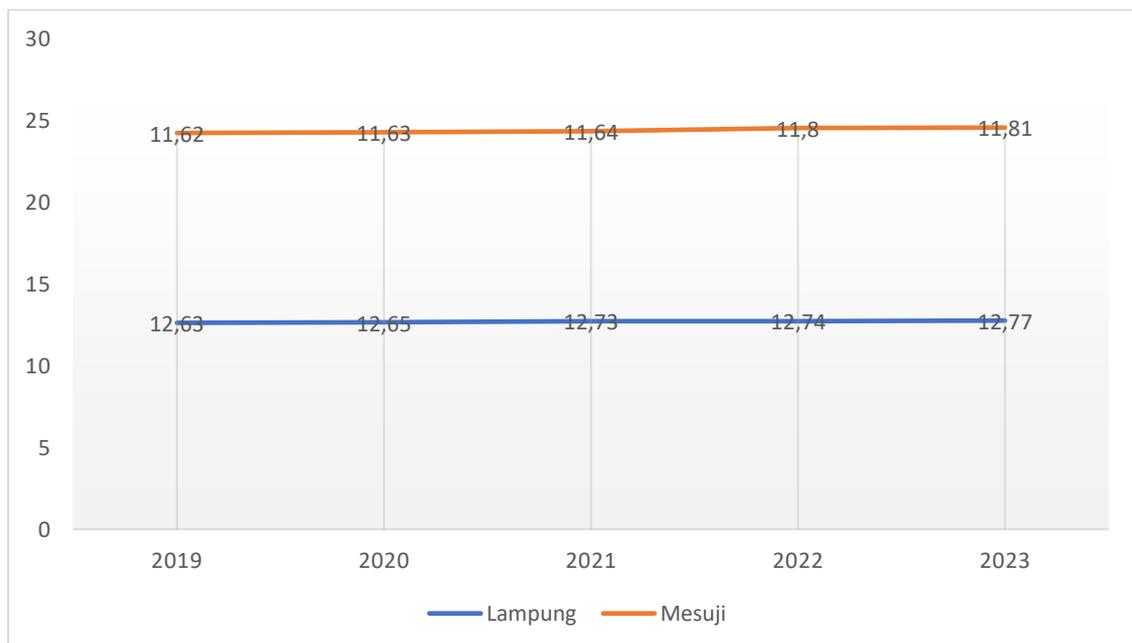
Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Nilai UHH Kabupaten Mesuji sebesar 73,40 (tahun 2021), 73,56 (tahun 2022) dan 73,71 (tahun 2023). Nilai UHH ini termasuk kategori “Tinggi” karena sudah melewati nilai 70,00 tahun. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kenaikan nilai IPM setiap tahunnya berbanding lurus dengan kenaikan UHH. Hal ini menunjukkan bahwa komposit kesehatan masyarakat di Kabupaten Mesuji sudah cukup baik.



Gambar 2. Grafik Nilai RLS Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023
 Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024, diolah

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai RLS Kabupaten Mesuji masih berada di bawah nilai RLS Provinsi Lampung. Nilai RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Pada tahun 2023, nilai RLS Kabupaten Mesuji sebesar 7,11 tahun. Sehingga dapat diartikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan di Kabupaten Mesuji sebesar 7,11 tahun atau jika dihitung dari tahun pertama di sekolah dasar, maka capain tersebut setara dengan pendidikan SMP kelas 1 (6 tahun SD dan 1 tahun SMP). Setelah itu, penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Mesuji tidak lagi menempuh pendidikan atau putus sekolah.



Gambar 2. Grafik Nilai HLS Kabupaten Mesuji dan Provinsi Lampung Tahun 2019-2023
 Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2024, diolah

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai HLS Kabupaten Mesuji masih berada di bawah nilai RLS Provinsi Lampung. Nilai HLS menunjukkan lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2023, nilai HLS Kabupaten Mesuji sebesar 11,81 tahun. Sehingga dapat diartikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang selama 11,81 tahun atau setara dengan SMA kelas 2 (6 tahun SD, 3 tahun SMP dan 2 tahun SMA). HLS.

Table 6. Jumlah Sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		
		SD	SMP	SMA
1	Way Serdang	29	12	3
2	Simpang Pematang	16	8	3
3	Panca Jaya	11	3	1
4	Tanjung Raya	24	9	2
5	Mesuji	16	7	2
6	Mesuji Timur	23	8	2
7	Rawajitu Utara	16	6	1
Total		135	53	14

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Mesuji. Ketersediaan sekolah menjadi syarat penting bagi kemajuan pembangunan dibidang pendidikan. Semakin tersedia dan meratanya sekolah, akan semakin memudahkan anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya.

Table 7. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD sederajat di Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	SD	Guru	Murid
1	Way Serdang	29	318	4.803
2	Simpang Pematang	16	203	3.818
3	Panca Jaya	11	122	2.128
4	Tanjung Raya	24	334	5.274
5	Mesuji	16	163	2.432
6	Mesuji Timur	23	265	3.695
7	Rawajitu Utara	16	6202	2.495
Total		135	1.607	24.645

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan jumlah Sekolah Dasar (SD) di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Kecamatan Way Serdang, Tanjung Raya dan Mesuji Timur memiliki jumlah SD yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini mengingat jumlah murid yang ada di tiga kecamatan tersebut cukup banyak. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah SD di Kecamatan Simpang Pematang yang memiliki banyak jumlah murid namun hanya ditampung oleh 16 SD yang ada.

Table 8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP sederajat di Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	SMP	Guru	Murid
1	Way Serdang	12	162	2.125
2	Simpang Pematang	8	106	1.142
3	Panca Jaya	3	45	631
4	Tanjung Raya	9	138	1.803
5	Mesuji	7	80	805
6	Mesuji Timur	8	94	1.105
7	Rawajitu Utara	6	72	728
Total		53	697	8.339

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Kecamatan Way Serdang dan Tanjung Raya memiliki jumlah SMP yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini mengingat jumlah murid yang ada di dua kecamatan tersebut cukup banyak. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah SMP sederajat di Kecamatan Simpang Pematang dan Mesuji Timur yang memiliki banyak jumlah murid namun hanya ditampung oleh 8 SMP yang ada.

Table 9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA sederajat di Kabupaten Mesuji Tahun 2023

No	Kecamatan	SMA	Guru	Murid
1	Way Serdang	3	63	895
2	Simpang Pematang	3	52	736
3	Panca Jaya	1	10	92
4	Tanjung Raya	2	38	792
5	Mesuji	2	23	326
6	Mesuji Timur	2	28	317
7	Rawajitu Utara	1	17	62
Total		14	231	3.220

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji. Kecamatan Way Serdang dan Simpang Pematang memiliki jumlah SMA yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini mengingat jumlah murid yang ada di dua kecamatan tersebut cukup banyak. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah jumlah SMA sederajat di Kecamatan Tanjung Raya yang memiliki banyak jumlah murid namun hanya ditampung oleh 2 SMA yang ada.

Table 10. Nilai APK dan APM Kabupaten Mesuji Tahun 2019-2023

Jenjang	APK	APM
SD	98,58	98,89
SMP	80,07	83,45
SMA	52,84	44,33

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai APK dan APM semakin rendah dengan semakin naiknya jenjang pendidikan. Bahkan nilai APM untuk jenjang SMA sederajat berada dibawah 50 persen, yaitu 44,33 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa hanya hanya sebesar 44,33 persen anak usia jenjang SMA yaitu 16-18 tahun yang bersekolah di Kabupaten Mesuji.

Kondisi lainnya yang terjadi di Kabupaten Mesuji adalah rendahnya tingkat pendidikan pada rumah tangga yang kepala keluarganya memiliki pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya sekolah yang dianggap sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan memiliki penghasilan memadai dari pekerjaan di bidang pertanian dan perkebunan, muncul keengganan untuk melanjutkan pendidikan bagi anggota keluarga.

Tingkat pendidikan yang rendah juga terjadi pada aparatur desa. Masih banyak aparatur desa yang hanya memiliki ijazah setingkat SMP. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat budaya enggan untuk bersekolah pada keluarga dengan mata pencaharian utama perkebunan seperti karet dan singkong. Rendahnya pendidikan kepala keluarga menjadi salah satu penghambat keinginan anggota keluarga untuk bersekolah.
2. Rendahnya tingkat pendidikan aparatur desa menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan pemerintahan di desa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disusun rekomendasi kebijakan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat memanfaatkan dana desa untuk membiayai aparatur desa yang belum memiliki ijazah SMP dan SMA.
2. Pemerintah Kabupaten Mesuji mewajibkan perusahaan pertanian dan perkebunan untuk mempekerjakan sumber daya manusia dengan kualifikasi minimal tamat SMA/ sederajat. Dengan demikian, perusahaan dapat memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai program pendidikan kesetaraan (paket) sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
3. Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Mesuji untuk meningkatkan akses pendidikan terutama pada jenjang SMA/ sederajat.

REFERENCES

- Bappeda Kabupaten Mesuji. (2022). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2023*. Mesuji
- BPS Kabupaten Mesuji. (2024). *Kabupaten Mesuji Dalam Angka Tahun 2024*. Mesuji
- BPS Provinsi Lampung. (2024). *Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2024*. Bandar Lampung
- Creswell, John W. (2005). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California : Sage Publication
- Sekretariat Negara RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta
- Todaro, Michael P. Smith, Stephen C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Willis, Katie. (2011). *Theories and Practices of Development*. New York : Routledge
- Winarno, Budi. 2013. *Etika Pembangunan*. Jakarta : Cabs Publishing